

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDEKATAN PEKERJA SOSIAL

*Social Welfare Development:
Society Empowerment in Social Worker Approach*

M. J. Maspaitella

Universitas Kristen Indonesia Maluku

Nancy Rahakbauwi

Universitas Kristen Indonesia Maluku

Naskah diterima: 26 Agustus 2014
Naskah dikoreksi: 16 November 2014
Naskah diterbitkan: 22 Desember 2014

Abstract: *Empowerment constitutes one of the ways to increase society's ability to meet their need. The goal of empowerment is to develop the potency and strength of the poor or the vulnerable group and transform them into a strong group. Effort to identify the potency of the society can be done with various approach and strategy. One of the approach or strategy is by the social work approach. Social worker as professional helper have the task to revamp the socially dysfunction society through empowerment activity.*

Key words: *Empowerment, community, social work approach.*

Abstrak: Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Efek pemberdayaan adalah mengembangkan potensi atau kekuatan kelompok miskin atau rentan sebagai kelompok yang kuat. Pengakuan akan potensi diri dalam masyarakat diperoleh melalui berbagai pendekatan dan strategi. salah satu pendekatan atau strategi yang digunakan secara tertulis pendekatan pekerja sosial. Pekerja sosial sebagai pembantu profesional memiliki tugas untuk merubah masyarakat yang tidak berfungsi secara sosial menjadi berfungsi melalui kegiatan pemberdayaan.

Kata kunci: Pemberdayaan, komunitas, pendekatan pekerja sosial.

Pendahuluan

Di negara kita masih terdapat banyak penduduk miskin, yang tersebar di perkotaan dan pedesaan. Di antara masyarakat miskin di pedesaan ini, yang kondisi kemiskinannya paling rentan adalah yang berdiam di wilayah terpencil, yaitu wilayah yang tidak terhubung dengan prasarana transportasi (darat, laut maupun udara) dan komunikasi dengan pusat-pusat pertumbuhan terkecil sekalipun (yaitu pusat desa atau kecamatan). Wilayah terpencil berada di pulau-pulau kecil maupun di pedalaman. Di beberapa wilayah pedesaan terpencil ini bermukim masyarakat adat dan masyarakat umum. Mereka adalah masyarakat yang masih sangat terbelakang, belum mampu mengembangkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan sangat sedikit menerima sentuhan pembangunan.

Indonesia pernah dua kali mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia atas keberhasilannya mengurangi jumlah penduduk miskin. Penghargaan pertama diberikan kepada pemerintahan Orde Baru yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari

sekitar 40% pada tahun 1976 menjadi sekitar 11% pada tahun 1996, berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Kedua pada periode 2005-2009, diberikan kepada pemerintahan SBY yang menurut catatan World Bank bahwa penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya, dengan laju rata-rata penurunan per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain seperti Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun (Prayitno, 2013:20). Angka kemiskinan di tahun 2005 adalah sebesar 15,97% atau sekitar 35,1 juta orang yang dapat ditekan menjadi 11,96% atau sekitar 29 juta orang per Maret 2012. Hal ini menunjukkan telah terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin yang mencapai 6 juta orang dengan tingkat konsistensi penurunan yang terjaga. Jumlah ini dapat diturunkan lagi menjadi 11,66% atau sekitar 28.59 juta orang per September 2012. Atau dengan perkataan lain, sepanjang 2005-2012 angka kemiskinan menurun rata-rata antara 1,16 persen hingga 1,27 persen per

tahun dan mampu menyelamatkan sekitar 7 juta jiwa keluar dari lingkaran kemiskinan (Prayitno, 2013:20).

Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, implementasi strategi pembangunan sosial merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Jika hal ini diabaikan, maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam proses pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan yang merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Pengertian kemiskinan adalah multi dimensi yang menyangkut kebutuhan masyarakat miskin terhadap kemampuan pada tingkat individu, maupun pada tingkat kolektif. Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam proses pemberdayaan ini diperlukan aktor yang dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin terhadap sumber daya, yaitu pekerja sosial profesional. Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Tinjauan ini bertujuan untuk memperlihatkan peran pekerja sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap berkurangnya penduduk miskin. Dengan pendekatan teori pekerjaan sosial dan pemberdayaan masyarakat, tulisan ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan teori pembangunan pekerjaan sosial yang dewasa sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan

Indonesia. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar secara umum berkaitan dengan kegagalan kepemilikan aset terutama tanah dan modal; terbatasnya jangkauan layanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung; rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal masyarakat; lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, tidak berwawasan lingkungan dan kurang melibatkan masyarakat; kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, berjangka pendek dan parsial; serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

Persoalan Pembangunan dan Pemberdayaan

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, dimana tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Perspektif kearah pencapaian pembangunan nasional juga diuraikan secara garis besar di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional sebagai suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan nasional mencakup pula upaya peningkatan semua aspek kehidupan bangsa, dapat berupa pembangunan ideologi.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Ciri utama pembangunan kesejahteraan adalah komprehensif atau terpadu dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosial kulturalnya. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan atau kelas sosial. Meskipun demikian, prioritas utama PKS adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*).

Sepanjang siklus kehidupan manusia, selalu dikelilingi oleh beragam masalah, baik itu masalah

internal (diri sendiri, keluarga) maupun eksternal (lingkungan Sosial). Masalah dalam kehidupan manusia seringkali menimbulkan kecemasan, keputusan, bahkan kehilangan orientasi hidup. Menurut Mendoza (1981:4) masalah disebabkan oleh adanya ketidakmampuan individu atau kadangkala patologi yang membuat seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan lingkungannya. Masalah menurut Jenssen (1992:42) dalam Suharto (2006) disebabkan oleh adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya.

Pada dasarnya setiap masyarakat mengalami proses perubahan, ada masyarakat yang berubah secara lambat dan ada masyarakat yang berubah secara cepat. Masyarakat yang berubah sangat lambat terkesan tidak berubah, sehingga dapat dikatakan kondisinya statis, tetapi sebetulnya tidak ada masyarakat yang statis sepenuhnya. Banyak pemikiran yang ingin menjelaskan realita perubahan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Perkembangan atau pembangunan masyarakat sebagai proses perubahan menunjukkan berprosesnya masyarakat yang semakin dewasa dalam merespons berbagai persoalan yang juga semakin berkembang sejalan dengan proses perubahan itu sendiri. Dalam pengertian ini, terkandung makna kapasitas masyarakat yang semakin meningkat yang kemudian membawa dampak pada peningkatan taraf hidupnya. Peningkatan kapasitas di sini termasuk meningkatnya dorongan dari dalam diri masyarakat untuk berubah semakin baik, kapasitas untuk mengidentifikasi sumber daya, potensi dan peluang serta memanfaatkannya dan kapasitas untuk merespons berbagai tantangan yang muncul. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhinya.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengutarakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. (b) menjangkau sumber-sumber positif produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusannya yang memengaruhi mereka.

Shakekat dengan konteks ini, (Hikmat, 2006:3) mengemukakan bahwa wacana pembangunan

masyarakat dalam konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Sementara itu, Mc Ardle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai keputusan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dan hubungan eksternal.

Mengembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang makin langka. Program-program pemerintah yang berbasis pemberdayaan akan menekan biaya untuk suatu pekerjaan dengan kualitas yang sama yang dikerjakan program non pemberdayaan. Pendekatan ini akan meningkatkan relevansi program pembangunan (pemerintah) terhadap masyarakat lokal dan meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja staf pemerintah dan kepuasan pelanggan atas pelayanan pemerintah (Prayitno, 2013:10)

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat lazim digunakan oleh banyak kalangan seperti para pembuat kebijakan dan keputusan, kalangan profesi dan praktisi, pekerja sosial termasuk kelompok-kelompok profesional berbagai argumentasi-argumentasi praktis maupun ilmiah yang ditampilkan melalui karya dan/atau tulisan tentang pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian dijadikan patokan dalam rangka menyalakan seluruh peran dan gerak dalam merumuskan program-program pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam kaitan ini, menjadi penting bagi pekerja sosial untuk memahami konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan tugas praktik pekerjaan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224) yaitu; pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife,1995). Lebih lanjut dikatakan oleh Parson, et all (1994), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan memengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Swift dan Levin (1987) mengungkapkan bahwa pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Konsep pemberdayaan masyarakat, banyak juga dikemukakan oleh ahli lain, yaitu salah satunya adalah Payne (1997:226), yang mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya, ditujukan guna: “*To help clients power of decision and action over their own lives by reducing the effect of sosial or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment too clients*” (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.)

Lebih lanjut dikatakan oleh Shardlow (1998:32), pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Ide atau gagasan yang sama juga disampaikan oleh Biestek (1961), yang dikenal dalam pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama ‘*self determination*’. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun

karena kondisi external (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Sennet, Cabb (1972) dan Conway menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997). Ketidakberdayaan menurut Seeman (1985), Seligman (1972) dan Learner (1986) meyakini bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka lemah, dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian.

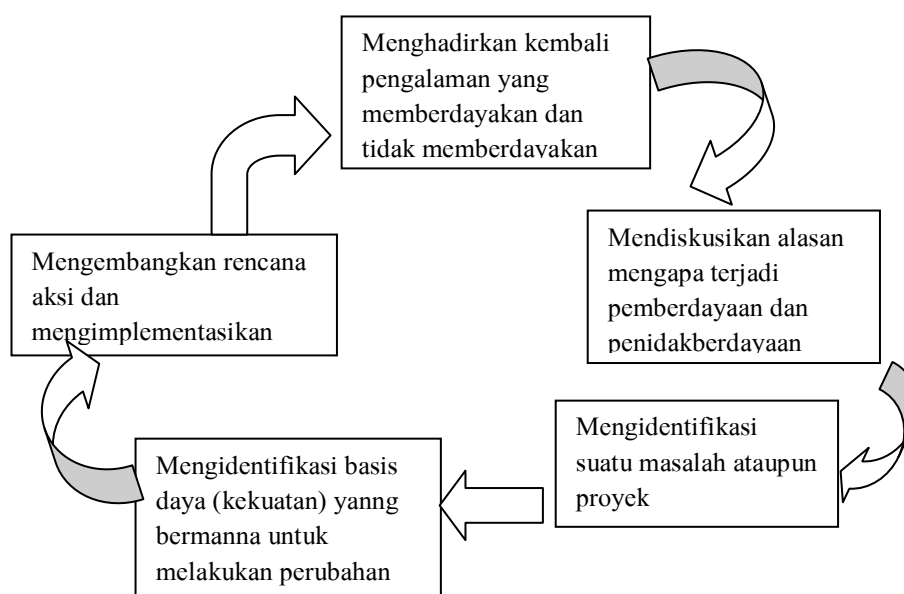
Strategi Pemberdayaan

Person *et.al.* (1994:112-113) menyatakan proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, meso, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, *stress management*, krisis intervensi. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*Task Centered Approach*).
2. Aras Meso. Pemberdayaan dilakukan pada sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

langkah-langkah logis berikutnya'. Dengan kata lain, seorang perencana biasanya berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah yang dihadapi sebelum memilih tindakan rasional dan tepat dilakukan (*rational and feasible*). Partisipasi dalam perencanaan sosial tidak “sekental” pada pengembangan masyarakat. Perencanaan dalam pengumpulan dan penganalisaan data (fakta) bisa saja menggunakan tenaga di luar komunitas tersebut, begitu pula dalam upaya mengembangkan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, mereka tetap mendasari tugasnya berdasarkan fakta dari masyarakat tersebut.



Skema 1. Siklus Pemberdayaan

(Sumber: Hogan, 2000:20)

Dalam konteks kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan digambarkan Hogan di atas tentu juga terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu tingkatan ke tingkat yang lebih baik. Tentunya dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan suatu komunitas menjadi kurang berdaya (*depowerment*).

Strategi Dasar dalam melakukan Perubahan

a. Pengembangan Masyarakat Lokal

Dalam pengembangan masyarakat lokal, strategi perubahannya dicirikan dengan ungkapan ‘marilah kita bersama-sama membahas masalah ini’. Dari ungkapan tersebut terlihat adanya upaya mengembangkan keterlibatan warga sebanyak mungkin dalam upaya menentukan kebutuhan yang mereka rasakan (*felt need*) dan memecahkan masalah mereka.

b. Perencanaan Sosial

Strategi dasar dari model ini tergambar dalam ungkapan ‘marilah kita kumpulkan fakta dan lakukan

c. Aksi Sosial

Strategi dari perubahan ini terlihat dari ungkapan “mari kita mengorganisasi diri agar dapat melawan penekan kita”. Ungkapan tersebut merupakan kristalisasi isu-isu yang dihadapi masyarakat, yang kemudian membuat masyarakat mengenali “musuhnya” dan mengorganisasi diri mereka dan membentuk aksi massa untuk ganti memberikan tekanan terhadap kelompok sasaran mereka. (Adi, 2008:128).

Sesungguhnya, dalam melakukan perubahan untuk memberdayakan suatu masyarakat ke arah memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesejahteraan tersebut menjadi penting untuk dilakukan sebuah perencanaan secara komprehensif. Dikatakan demikian karena perencanaan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu akan datang dan yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Perencanaan mempunyai unsur-unsur: (a) berhubungan dengan masa depan; (b) mendesain

seperangkat kegiatan secara sistematis; dan (c) dirancang untuk mencapai keinginan-keinginan dimasa depan berdasarkan kondisi masa lalu, saat ini dan akan datang. Bahwa, perencanaan ini akan menghasilkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, (Ikhwanuddin, 2009:11).

Peran Pelaku Perubahan (*Change Agent*)

Pelaku perubahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat yang berkaitan dengan peran pelaku perubahan dalam diskursus komunitas. Dalam diskursus ini, pelaku perubahan memainkan peran sebagai *community worker* ataupun *enabler* (Ife, 1997:53). Sebagai *community worker*, Ife melihat sekurang-kurangnya ada empat peran dan keterampilan utama yang nantinya secara spesifik akan mengarah pada teknik dan keterampilan tertentu yang harus dimiliki *community worker* sebagai pemberdaya masyarakat.

Keempat peran dan keterampilan tersebut adalah:

1. Peran dan keterampilan fasilitatif (*facilitative roles and skills*);
2. Peran dan edukasional (*educational roles and skills*);
3. Peran dan keterampilan perwakilan (*representational roles and skills*);
4. Peran dan keterampilan teknis (*technical role and skills*).

Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Pelindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219):

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Pelindungan: melidungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan

mencegah terjadi eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan ada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Debois dan Miley (1992:211) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.

1. Membangun relasi pertolongan yang; (a) merefleksikan respons empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self detemination*);(c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerja sama klien (*client partneerships*).
2. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidasetaraan kesempatan.

Prinsip Pemberdayaan

Pelaksanaan pendekatan di atas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976),

Rappaport (1981, 1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan, dan Kisthardt (1989), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 1997: 216-217)

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat memengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Pekerjaan Sosial: Model Praktik Profesional

Model praktik Pekerjaan Sosial ini muncul dari adanya proses unifikasi karena terbentuknya *Council on Social Work Education* pada tahun 1952. Sejak saat itu, profesi pekerjaan sosial mulai berusaha merumuskan konsepsi mengenai metodologi pertolongan yang digunakannya. Persoalan ini yang selain mencakup aplikasi profesi ke dalam praktik pekerjaan sosial secara menyeluruh, adalah juga merupakan tingkatan konseptualisasi dan operasi profesi sebagai reaksi terhadap pekerjaan sosial tradisional yang terlalu

mengarah pada spesialisasi. Dalam model praktik pekerjaan sosial tersebut tercermin tujuan-tujuan, nilai-nilai, pengetahuan, serta tindakan-tindakan interventif yang teridentifikasi dalam profesi pekerjaan sosial. Dalam model ini tercermin cara-cara yang sama dalam memandang orang dan situasinya, yang selalu terkait dengan kesadaran diri, dan disiplin profesional individu sebagai praktisi. Praktik pekerjaan sosial dapat didefinisikan sebagai “konstelasi nilai, tujuan, sanksi, pengetahuan, dan metoda”, yang dikembangkan dari seperangkat tujuan-tujuan profesional, sebagai yang diyakini dan diakui oleh masyarakat umum. Praktik pekerjaan sosial setidaknya memiliki dua tingkatan sebagai berikut:

- a. Tindakan atau kegiatan interventif yang diarahkan pada tujuan-tujuan dan dibimbing atau disadari oleh nilai-nilai, pengetahuan-pengetahuan, dan teknik-teknik yang secara kolektif unik, dan diakui, diterima, serta dikembangkan oleh profesi pekerjaan sosial.
- b. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku yang ditujukan untuk mengadakan perubahan terencana pada individu-individu, kelompok-kelompok serta sistem-sistem sosial.

Dengan demikian, pekerjaan sosial adalah praktik profesional dalam pengertian, bahwa tindakan-tindakan serta pelayanan-pelayanan yang diberikannya dilaksanakan oleh anggota-anggota yang berpendidikan khusus dan secara formal diakui dan diterima oleh dan di dalam profesi pekerjaan sosial. Sebagai profesional, selain para pekerja mengetahui hakekat tindakan-tindakannya, dan dapat menjelaskan dan mengkomunikasikannya, juga perlu didasari oleh prinsip-prinsip tertentu, standar kerja yang kompeten dan dengan kode etik profesi. Dalam kaitan pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial memiliki tugas yang menurut Schwartz (1961:157-158), terdapat 5 (lima) tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial yaitu:

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (*significant others*) terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi dari mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka

dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka

4. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.
5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi 'kontrak kerja' yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsinya masing-masing.

Penutup

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin agar aset dan kemampuan mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok. Pemberdayaan masyarakat harus dapat berlangsung secara efektif, maka harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Pemberdayaan Masyarakat sebagai sebuah strategi atau model dalam rangka menggali potensi dan kemampuan masyarakat untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mereka dapat berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun sosial. Proses pemberdayaan bagi masyarakat dilaksanakan bukan hanya dari pemerintahan saja, namun dari kalangan profesi yang dapat melakukan perubahan bagi kehidupan masyarakat. Implikasinya, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam rangka memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat.

Pelaku pemberdaya perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi, agar dapat melakukan pendampingan secara baik. Pelaku pemberdaya yang potensial adalah organ pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal, yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat miskin dan terbelakang. Upaya pemberdayaan masyarakat menuntut pola kerja yang fleksibel, tidak terhambat oleh sistem administrasi penganggaran yang ketat. Agar pelaku pemberdaya masyarakat dapat bekerja secara profesional, maka mereka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Profesi pekerja sosial sebagai pemberi bantuan secara profesional dalam rangka memecahkan permasalahan sosial yang dapat meningkatkan ketidakberdayaan masyarakat menjadi berdaya secara mandiri. Atau dengan kata lain mengalami ketidakberfungsian sosial menjadi keberfungsian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2009. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi Revisi. Jakarta: penerbit Humaniora.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Jakarta: Penerbit Buku Pendidikan – Anggota IKAPI.
- Ife, Jim, Tesoriero Frank. 2006. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikhwanuddin, Mohammad Mawardi. 2009. *Membangun Daerah yang Berkelanjutan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan*, Bogor: Penerbit IPB Press.
- Isbandi, Adi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Prayitno, Ujianto Singgih (ed). 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika.
- Prayitno, Ujianto Singgih. 2013. "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan," dalam Sali Susiana (ed), *Kebijakan Pemerintah SBY*, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Suharto Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Penerbit PT Refika Aditama.